



# **L A P O R A N**

**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI  
KE KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**MASA RESES  
MASA PERSIDANGAN III  
TAHUN SIDANG 2023 – 2024**

**TANGGAL 28 FEBRUARI – 3 MARET 2024**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA, FEBRUARI 2024**



**L A P O R A N**  
**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI**  
**PADA RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2023 – 2024**  
**KE KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**TANGGAL 28 FEBRUARI – 3 MARET 2024**

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI mengawasi berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Untuk itu, Komisi IX DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke 3 (tiga) daerah di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja, Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pengawasan obat dan makanan, dan jaminan kesehatan, mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung, baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN dan juga untuk memonitor pelaksanaan Program-Program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di daerah tujuan kunjungan kerja terkait dengan tujuan di bidang kesehatan diantaranya terkait jaminan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, penanganan stunting, transformasi kesehatan, penanganan penyakit menular dan tidak menular, dan dibidang ketenagakerjaan terkait perluasan kesempatan kerja dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dan peningkatan kualitas angkatan kerja di tanah air.

Selain itu, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah lainnya. Hasil kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan dengan kementerian terkait dan mitra kerja lainnya.

### **1.2 Dasar Kegiatan**

- a. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja berkelompok dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023 – 2024.
- b. Kesimpulan Internal Rapat Komisi IX DPR RI Tanggal Januari 2024.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

- a. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI.
- b. Menggali informasi realisasi program dan kegiatan yang dibiayai APBN.
- c. Memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi IX DPR RI di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
- d. Menyerap aspirasi masyarakat Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI.

### **1.4 Kegiatan**

Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang juga akan dihadiri oleh:

1. Walikota Batam;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam;
4. Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
6. Perwakilan Loka POM Kota Batam;
7. Kepala BP3MI Provinsi Kepulauan Riau;
8. Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan (Kepri, Riau, Sumbar, Jambi);
9. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kota Batam;
10. Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbarriau;
11. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Batam;
12. Kepala BLK BP Batam;
13. Perwakilan Puskesmas Kota Batam;
14. Perwakilan Kader Posyandu di Kota Batam;
15. Perwakilan Asosiasi atau Organisasi Pengusaha dan APINDO Kota Batam;
16. Perwakilan Asosiasi atau Organisasi Pekerja / Buruh dan FSPMI Kota Batam.

Tim Komisi IX DPR RI akan didampingi Mitra Komisi IX DPR RI dari Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI; Badan POM RI; BKKBN RI; BP2MI RI; Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan; dan Direksi dan Dewan BPJS Ketenagakerjaan.

### **1.5. Tim Kunjungan Kerja**

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh Ibu Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA dari fraksi PKB. Adapun susunan lengkap anggota rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI sebagai berikut:

NO.	NO ANGG.	NAMA	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
1.	A-35	Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A	Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI	PKB	JATIM III
2.	A-393	FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E	Ketua Komisi IX DPR RI	NASDEM	SULUT
3.	A-149	Dra. ELVA HARTATI, SIP., MM	Anggota	PDIP	BENGKULU
4.	A-182	Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep	Anggota	PDIP	JATENG III
5.	A-222	H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H	Anggota	PDIP	JATIM IX
6.	A-271	Drs. H. DARUL SISKI	Anggota	GOLKAR	SUMBAR I
7.	A-291	Hj. DEWI ASMARA, SH, MH.	Anggota	GOLKAR	JABAR IV
8.	A-320	M. YAHYA ZAINI, SH	Anggota	GOLKAR	JATIM VIII
9.	A-67	ADE REZKI PRATAMA, S.E, M.M	Anggota	GERINDRA	SUMBAR II
10.	A-70	Dr. Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M	Anggota	GERINDRA	JAMBI
11.	A-90	drg. PUTIH SARI	Anggota	GERINDRA	JABAR VII
12.	A-357	IRMA SURYANI, S.E., M.M	Anggota	NASDEM	SUMSEL II
13.	A-27	Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M	Anggota	PKB	JATENG IX
14.	A-30	H. SUKAMTO, S.H	Anggota	PKB	D.I.Y
15.	A-545	LINDA MEGAWATI, SE., M.Si	Anggota	DEMOKRAT	JABAR IX
16.	A-553	Dra. LUCY KURNIASARI	Anggota	DEMOKRAT	JATIM I
17.	A-569	HASAN SALEH	Anggota	DEMOKRAT	KALTARA
18.	A-414	H. ANSORY SIREGAR, Lc	Anggota	PKS	SUMUT III
19.	A-480	Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, MA	Anggota	PAN	SUMUT II
20.	A-494	DIAN ISTIQOMAH, S.Kep	Anggota	PAN	DKI JKT III
21.	A-504	H. SUNGKONO	Anggota	PAN	JATIM I
22.	A-465	Hj. NURHAYATI	Anggota	PPP	JABAR XI

## II. GAMBARAN UMUM KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

### 2.1 Gambaran Umum

Kota Batam merupakan salah satu kota yang masuk dalam bagian Provinsi Kepulauan Riau. Batam juga menjadi salah satu wilayah yang masuk ke dalam Free Trade Zone atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Batam terdiri dari 238 pulau, dengan luas daratan 1.038,84 km<sup>2</sup>. Secara keseluruhan, Batam memiliki luas 3.829,93 km<sup>2</sup>, yang terbagi atas 27 persen daratan dan 73 persen lautan. Kota Batam berbatasan dengan Selat Singapura di sebelah utara, Kecamatan Moro (Filipina Selatan) di sebelah Selatan, Kecamatan Bintan Utara di sebelah Timur, dan Kabupaten Karimun di sebelah Barat.

Posisi Kota Batam memang dapat dikatakan strategis karena berada di jalur perdagangan, yaitu Selat Malaka dan negara-negara tetangga lainnya. Namun, keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki membuat pembangunan kota Batam tidak dapat mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam. Pengembangan perekonomian di kota ini bergantung pada pembangunan infrastruktur yang memegang peranan penting dalam pembangunan kawasan.



Gambar 1. Peta Kota Batam

Konsep pengembangan Batam sebagai daerah industri pada dasarnya mengandalkan letak geografis yang strategis dengan negara tetangga, yaitu Singapura yang termasuk ke dalam salah satu kawasan lintas pelayaran tersibuk di dunia. Dengan potensi yang ada, pengembangan Batam diarahkan pada sektor industri pengolahan, alih kapal, penumpukan logistik serta pariwisata. Pembangunan infrastruktur di Batam juga menjadi salah satu yang sangat diperhatikan untuk mempertahankan iklim kondusif bagi investasi asing di Batam, Kepulauan Riau.

Setelah ditetapkan sebagai salah satu wilayah yang termasuk dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, membuat Kota Batam semakin tumbuh perekonomiannya, yang digerakkan oleh pergerakan investasi asing, terutama industri manufaktur yang masuk ke Batam. Meskipun Batam hanya merupakan kota kecil di Kepulauan Riau, namun besarnya investasi asing yang ada didalamnya membuat Batamberhasil mendapatkan predikat kota metropolitan. Banyak sekali kompleks perindustrian, hotel-hotel, gedung-gedung tinggi yang berdiri di Batam, membuat Batam tampak seperti sebuah kota dengan kebutuhan hidup yang tinggi.

## Ekonomi

Berdasarkan data BPS, perekonomian Provinsi Kepri tumbuh sebesar 5,77 persen sepanjang semester I 2023 (Januari-Juni) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lebih lanjut, perekonomian Kepri pada triwulan II 2023 tumbuh sebesar 5,04 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan triwulan II 2022 (*year-on-year*) yang hanya mencatatkan 5,01 persen. Badan Pengusahaan (BP) Batam menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 7,5 persen pada 2024.

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau (Kepri) pada tahun 2023 mencapai 79,08, meningkat 0,6 poin (0,76 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (78,48). Selama 2020–2023, IPM Kepri rata-rata meningkat sebesar 0,59 persen per tahun. Angka IPM Kepri ini pun menempati posisi ke-3 tertinggi di tingkat nasional. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam pada tahun 2023 mencapai 82,64 meningkat 0,39 poin (0,47 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (82,25). Selama 2020–2023, IPM Kota Batam rata-rata meningkat sebesar 0,34 persen per tahun.

### III. HASIL KUNJUNGAN KERJA BIDANG KESEHATAN

#### Umum

Visi : terwujudnya masyarakat batam yang mandiri dalam hidup bersih, sehat dan berkeadilan Misi :

1. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
2. Meningkatkan upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan
3. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan Sumber Daya Kesehatan dalam pelayanan primer

Target dinas kesehatan jangka menengah berdasarkan Renstra tahun 2021-2026 adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Batam yang setinggi-tingginya dengan indikator indeks Kesehatan. Target jangka panjang kesehatan di kota batam berdasarkan Misi III RPJP tahun 2005-2025 adalah Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud; peningkatan daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan serta penguatan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam bidang kesehatan; menyediakan sarana dan prasarana pelayanan untuk perhatian khusus pada penduduk rentan sosial antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin.

#### Berikut APBD Kota Batam

	<b>2023</b>	<b>% (Persentase)</b>	<b>2024</b>	<b>% (Persentase)</b>
<b>APBD</b>	Rp. 488.077.270.132		Rp. 439.087.607.220	
<b>Belanja Modal</b>	Rp. 17.310.651.093	3.86%	Rp. 29.344.795.092	6.68%
<b>Belanja Barang</b>	Rp. 203.753.346.689	45.47%	Rp. 154.889.281.370	35.28%
<b>Belanja Pegawai</b>	Rp. 227.013.272.350	50.66%	Rp. 254.853.530.758	58.04%

#### Jaminan Kesehatan

Kota Batam memiliki Jaminan kesehatan daerah yang disebut Bantuan Kesehatan Daerah atau Bankesda. Bankesda mengakomodir kebutuhan pembiayaan kesehatan melalui 3 jenis bantuan yaitu:

1. Bantuan biaya layanan kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai peserta JKN atau sudah terdaftar namun tidak bisa mengakses manfaat JKN;
2. Bantuan iuran yang mengakomodir kebutuhan pembiayaan iuran/premi JKN bagi masyarakat miskin yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (Batam UHC sejak 2023);
3. Bantuan Biaya Rujukan yang mengakomodir kebutuhan pembiayaan transportasi dan akomodasi bagi peserta JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah.



Dalam penyelenggaraan Bankesda, proses integrasi berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Namun, optimalisasi JKN yang melibatkan banyak stakeholder, termasuk swasta, tidak dapat dipungkiri masih menghadapi berbagai kendala, diantaranya :

1. Validitas data status sosial masyarakat oleh instansi yang berwenang terhadap masalah sosial;
2. Potensi fraud dari perusahaan pemberi kerja;
3. Kecenderungan pekerja untuk mendaftarkan anggota keluarga sebagai peserta PBU dan BP Pemda, terutama bagi pekerja dengan rentang waktu kontrak dibawah 1 tahun;
4. Sustainability anggaran Pemerintah Daerah dengan peningkatan permohonan bantuan iuran.

Upaya Untuk Meningkatkan Pelayanan Bagi Masyarakat Di Daerah Terpencil :

1. Posbindu Mobile : Menyediakan layanan POS PEMBINAAN TERPADU bergerak yang secara berkala mengunjungi wilayah terpencil untuk memberikan layanan kesehatan dasar, seperti pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, dan konsultasi medis.
2. Pelayanan Kontak Tidak Langsung / Konsultasi Mobile JKN : Mengembangkan program tele konsultasi melalui di mana penduduk di daerah terpencil dapat berkonsultasi dengan tenaga medis melalui aplikasi Mobile JKN untuk mendapatkan diagnosa awal atau saran kesehatan tanpa harus datang langsung ke Puskesmas.
3. Penyuluhan Kesehatan Rutin: Mengadakan kegiatan penyuluhan kesehatan secara rutin di desa-desa terpencil untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perawatan kesehatan preventif dan promosi gaya hidup sehat.
4. Peningkatan Kompetensi Kader Posyandu : Melakukan pelatihan dan pengembangan kader dari desa tersebut untuk memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat setempat, seperti deteksi Stunting dan gangguan kesehatan ringan, pertolongan pertama, pemberantasan sarang nyamuk dan distribusi obat-obatan pencegahan penyakit
5. Pendampingan Kesehatan oleh tenaga kesehatan lokal : Melatih pendamping kesehatan dari kalangan masyarakat setempat yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan (bidan, perawat desa) yang bisa memberikan informasi dan bantuan kepada warga dalam mengakses layanan kesehatan, serta membantu dalam mengelola jadwal dan administrasi medis.
6. Pos Kesehatan Desa dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu : Mendirikan POSKESDES DAN PUSTU di beberapa titik strategis di desa terpencil yang dilengkapi dengan peralatan dasar dan tenaga kesehatan terlatih untuk memberikan layanan kesehatan awal dan mengarahkan kasus yang lebih serius ke Puskesmas kecamatan.
7. Pelaksanaan Program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga atau PIS PK.

### Pelaksanaan Program Imunisasi

Pelaksanaan program imunisasi kota sesuai dengan pedoman pelaksanaan imunisasi dan permenkes no 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi yang didalamnya memuat tentang Imunisasi rutin dan Imunisasi tambahan, berikut ini adalah angka cakupan tahun 2022 dan 2023 :

<b>Uraian</b>	<b>2022 (%)</b>	<b>2023 (%)</b>
<b>Imunisasi Rutin</b>		
- IDL	88,3	69,19
- IBL	79,8	43,59
<b>Imunisasi Tambahan</b>		
- BIAS		
- MR	93,36	61,3
- Dt	66,53	36,5
- Td 1	65,21	33,7
- Td 2	64,00	31,8
- HPV	-	72,97

- Pelayanan Imunisasi dilaksanakan di 21 Puskesmas Kota Batam
- Pelayanan imunisasi Rutin dilaksanakan di Puskesmas dan Posyandu wilayah kerja puskesmas
- Melaksanakan pelayanan BIAS di Sekoalah wilayah kerja puskesmas pada bulan Agustus dan November
- Pelaksanaan Imunisasi Antigen Baru yaitu HPV di Kota Batam dilaksanakan pada Agustus 2023, dengan capaian 72.97%, sasaran Imuniasasi HPV yaitu untuk siswa Perempuan kelas 5. beberapa rencana dan strategis adalah sebagai berikut :
- Sosialisasi lebih awal tentang manfaat dari vaksinasi HPV dengan lebih melibatkan Dinas Pendidikan dan Kemenag.

### Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Kesehatan (Puskesmas dan Instalasi Farmasi) berjumlah 809 orang dengan 10 jenis ketenagaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019, bahwasannya Puskesmas minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan yakni Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan dan Kefarmasian). Pada beberapa Puskesmas standar minimal ketenagaan di Puskesmas belum terpenuhi. Terutama tenaga kesmas, analis laboratorium dan nutrisisionis.

Jumlah dan distribusi tenaga kesehatan yang merupakan salah satu unsur kekuatan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dilihat dari jumlah tenaga kesehatan secara keseluruhan baik pemerintah maupun swasta. Jumlah tenaga kesehatan yang ada sesuai dengan jenis ketenagaannya dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk. Di Kota Batam jumlah tenaga kesehatan dari 13 jenis tenaga kesehatan pada tahun 2020 hanya 3 jenis tenaga kesehatan yang memenuhi standar rasio yakni dokter spesialis, dokter umum dan apoteker, sementara jenis tenaga kesehatan lainnya seperti dokter gigi, perawat, bidan, perawat gigi, teknisi kefarmasian, kesehatan masyarakat,



sanitarian, nutrisisionis, keterampilan medis, keteknisian medis belum memenuhi standar rasio. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, dari empat indikator terkait tenaga kesehatan, yakni tenaga dokter, dokter spesialis, bidan dan perawat terhadap rasio jumlah penduduk, di Kota Batam, tiga jenis tenaga kesehatan sudah terpenuhi

### Sarana Pelayanan Kesehatan

Sarana pelayanan kesehatan merupakan unsur penting dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan, keberadaan baik secara kuantitas dan kualitas maupun dalam penyebarannya sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan sarana kesehatan mengikuti dinamika pertumbuhan penduduk sehingga dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Di Kota Batam fasilitas kesehatan terus meningkat dari tahun ketahun, baik dengan kepemilikan Pemerintah Daerah maupun swasta. adanya peningkatan sarana kesehatan sehingga sarana kesehatan rumah sakit tahun 2020 berjumlah 19, dengan rasio per 100.000 penduduk adalah 1:1.53, artinya setiap rumah sakit dapat melayani 2 orang setiap 100.000 penduduk, demikian juga dengan sarana kesehatan lainnya. Sarana kesehatan yang masih rendah jika dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk tahun 2020 adalah Puskesmas dengan rasio jumlah Puskesmas terhadap jumlah penduduk adalah 1:0.53 atau 1 : 56971 (standar rasio 1: 30.000 penduduk) dalam hal ini masih dibutuhkan jumlah Puskesmas lebih kurang 18 Puskesmas guna memenuhi standar rasio puskesmas terhdap jumlah penduduk. Demikian juga dengan jumlah Posyandu, standar rasio Posyandu terhadap jumlah balita adalah 200, di Kota Batam tahun 2020 rasio Posyandu terhadap jumlah balita adalah 1: 283, jika dilihat dari jumlah balita pada tahun 2020, seharusnya jumlah posyandu adalah 753, dengan jumlah posyandu yang ada 535 posyandu masih diperlukan sekitar 219 posyandu guna memenuhi standdar rasio dalam rangka meningkatkan aksesibilitas sarana kesehatan kepada masyarakat. Ketersediaan Polindes dan Poskesdes juga masih belum terpenuhi, namun dalam hal ini adanya Bidan Praktek Mandiri (BPM) sangat membantu dalam memenuhi kekurangan tersebut.

Melihat dari distribusi sarana dan prasarana Puskesmas di Kota Batam, untuk ketersediaan sarana masih terdapat 2 Puskesmas yang belum terpenuhi dalam pengadaan sarana Puskesmas, dapat disampaikan bahwa Puskesmas Tanjung Uncang dan Puskesmas Mentarau merupakan Puskesmas yang baru dibangun dan baru beroperasi, sehingga untuk memenuhi ketersediaan sarana dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Untuk ketersediaan prasarana Puskesmas rata rata sudah terpenuhi 40%, dan Alat kesehatan rata yang sudah terpenuhi 42%. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana di Puskesmas dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan mengikuti perkembangan regulasi yang ada.

## Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) salah satu isu di bidang kesehatan dari rencana aksi global yang disepakati pemimpin dunia, termasuk Indonesia, melalui Sustainable Development Goals (SDGs). AKI merupakan salah satu indikator kesehatan

selain ekonomi dan tingkat pendidikan dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Dalam rangka mencapai kesepakatan SDGs, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan target AKI pada tahun 2024 mencapai 183 per 100.000 kelahiran hidup. Pemerintah Kota Batam dalam mendukung kesepakatan tersebut di atas dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembangunan sektor kesehatan pada 5 tahun terakhir telah berhasil menurunkan AKI

Sepanjang tahun 2016-2020 kematian ibu di Kota Batam kematian ibu dapat ditekan sehingga mencapai target nasional. Pada tahun terakhir AKI di Kota Batam mencapai 65.41 per 100.000 kelahiran hidup angka ini merupakan AKI yang paling rendah sepanjang 5 tahun terakhir. seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Informasi mengenai AKI menggambarkan hasil dari pelaksanaan program peningkatan kesehatan reproduksi dan pelayanan kesehatan ibu pada masa kehamilan, persalinan dan nifas serta ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia kesehatan yang terkait dengan pelayanan kesehatan ibu baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan melibatkan peran masyarakat melalui desa siaga dan peran keluarga melalui suami siaga.

## Angka Kematian Bayi (AKB)

Pemerintah Kota Batam sangat mendukung program- program yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak guna mempersiapkan generasi penerus sebagai sumber daya manusia yang tangguh cerdas dan sehat pada setiap tahap siklus kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan AKB terutama pada 5 tahun terakhir. Tahun 2017 terjadi sedikit peningkatan dan di tahun berikutnya menunjukkan penurunan hingga pada tahun 2020 berada pada titik terendah dengan 3.85 per 1000 kelahiran hidup. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKB adalah dengan meningkatkan cakupan pelayanan ibu bersalin, ibu bersalin difasilitasi pelayanan kesehatan, pelayanan neonatus terutama pada 28 hari pertama, mencakup pemantauan tumbuh kembang bayi, pemberian imunisasi, ASI eksklusif dan peningkatan promosi kesehatan pada ibu serta keluarga tentang perawatan bayi.

## Tuberkulosis

Berdasarkan hasil laporan global TB tahun 2020 lalu, Indonesia termasuk dalam 3 negara dengan beban tuberkulosis (TBC) terbesar di dunia dan kematian akibat TB diperkirakan 98.000 orang meninggal karena TB setiap tahunnya. Hal ini mendorong pengendalian tuberkulosis nasional terus dilakukan dengan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program TB.

Pada kawasan pulau Sumatera termasuk Kota Batam diperkirakan prevalensi TB berkisar 160 per 100.000 penduduk. Dalam hal pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC sesuai standar menjadi salah satu indikator target SPM (standar pelayanan minimal) bidang Kesehatan sesuai dengan Permenkes No 4 tahun 2019.

## **BADAN POM**

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan (Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Pangan), selama kurun waktu 2023 telah melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan
  - BPOM di Batam telah berhasil melakukan pengawasan terhadap terhadap 70 Sarana Produksi Pangan (MD = 48 Sarana dan IRTP = 22 Sarana) dan 4 Sarana Produksi Kosmetik. Dari hasil pengawasan tersebut didapatkan 65 sarana (87.84%) memenuhi ketentuan dan 9 sarana (12.16%) tidak memenuhi ketentuan terhadap ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Persyaratan pengujian internal Laboratorium, Ketidaksesuaian Label Kemasan Produk, dan Layout Fisik Bangunan). Pengawasan terhadap 297 sarana distribusi Obat dan Makanan yang meliputi sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, klinik kecantikan, distribusi kosmetik dan sarana peredaran pangan olahan. Dari hasil pengawasan tersebut didapatkan 226 sarana (76,1%) memenuhi ketentuan dan 71 sarana (23,9%) tidak memenuhi ketentuan terhadap produk rusak, kadaluarsa serta tidak memiliki izin edar.
  - Selama tahun 2023 Balai POM di Batam melakukan pengawasan terhadap 330 Sarana Distribusi obat dan Pelayanan Kefarmasian yang meliputi PBF, Rumah sakit, Puskesmas, klinik, apotek dan toko obat. Dari hasil pengawasan tersebut didapatkan 227 Sarana (68.8%) memenuhi ketentuan dan 103 sarana (31.2%) tidak memenuhi ketentuan dalam hal perizinan dan pengadaan serta penyaluran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Terhadap sarana tidak memenuhi ketentuan telah dilakukan pembinaan secara langsung oleh kepala Balai POM di Batam serta bimbingan penyusunan CAPA oleh petugas pemeriksa. Balai POM di Batam juga melakukan pengawasan terhadap 844 iklan dan 1475 label/penandaan produk Obat dan Makanan serta rokok yang beredar di wilayah Prov. Kepulauan Riau;
  - Dalam rangka hari besar keagamaan Balai POM di Batam telah melakukan Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan Ramadhan dan Idul Fitri 2023 pada 49 sarana distribusi pangan olahan dengan hasil 33 sarana memenuhi ketentuan dan 16 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Dilakukan juga Pengawasan Pangan Olahan

Menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 pada 54 sarana distribusi pangan olahan dengan hasil 39 sarana memenuhi ketentuan dan 15 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Sebagian besar pelanggaran adalah peredaran pangan yang tidak memiliki izin edar dan pangan kedaluarsa, dengan tindak lanjut produk adalah pemusnahan.

- Keberpihakan BPOM di Batam terhadap UMKM diwujudkan dengan telah terbitnya 13 Sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan 27 (dua puluh tujuh) NIE Pangan Olahan dari 13 UMKM Pangan antara lain meliputi produk roti/bakery, kerupuk ikan, frozen food (daging analog), 1 (satu) Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Produksi Kosmetika yang Baik dan 1 (satu) Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika sebagai hasil pendampingan tahun 2023
  - Balai POM telah menerbitkan 2.187 layanan terdiri dari 1.806 Surat Keterangan Impor (SKI Produk Pangan, SKI Bahan Baku Pangan, SKI Kosmetika) dan 381 Surat Keterangan Ekspor (*Health Certificate, Certificate Free Sale, To Whom it May Concern*) untuk komoditi pangan dan Bahan pangan.
  - Balai POM di Batam telah melakukan sampling terhadap 1406 produk Obat dan Makanan dan dilanjutkan dengan pengujian sesuai dengan Parameter Uji Kritis.
- Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.
- Temuan Produk TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) hasil pengawasan rutin distribusi Obat dan Makanan sebanyak 6.401 item, 10.225 pieces, dengan nilai ekonomi Rp 324.285.525. Secara garis besar produk yang tidak memenuhi ketentuan tersebut adalah sediaan farmasi termasuk kosmetik, obat bahan alam dan pangan yang tidak memiliki izin edar maupun rusak dan kedaluarsa. Terhadap produk tersebut ditindaklanjuti dengan pemusnahan dan pengamanan produk
  - Penyidik Balai POM di Batam selama tahun 2023 telah menangani sebanyak 6 perkara di bidang Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti secara pro-justitia. Barang Bukti yang disita berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Batam sebanyak 1.445 item sejumlah 147.955 pcs berupa Kosmetika sebanyak 494 item sejumlah 81.801 pcs, Obat Tradisional sebanyak 36 item sejumlah 8.646 pcs, Obat sebanyak 6 item sejumlah 385 pcs, Suplemen Kesehatan sebanyak 7 item sejumlah 18.947 pcs, Obat Kuasi sebanyak 17 item sejumlah 1.307 pcs dan Pangan Olahan sebanyak 885 item sejumlah 36.869 pcs, dengan nilai total keekonomian dari 6 perkara yang di proses pro justitia sebesar Rp. 2.820.998.147 (Dua milyar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
  - Telah melakukan pengamanan sebanyak 12 paket kiriman yang berisi Obat-Obat Tertentu (OOT)/ Obat Tanpa Izin Edar Badan POM

RI yang sering disalahgunakan, OOT tersebut sebanyak 4 item sejumlah 3.728 pcs, yang terdiri dari; Hexymer sebanyak 1.536 pcs, Trihexyphenidyl Tablet 2 mg (generik) sebanyak 410 pcs, Tramadol sebanyak 1.682 pcs dan Dekstrometorfan sebanyak 100 pcs.

- Telah menerima pelimpahan kasus Ketamine yang berasal dari Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau dengan berat bruto +/- 3.260 (tiga ribu dua ratus enam puluh) gram dan dari Penyidik Kepolisian Daerah Kepulauan Riau berupa 4 (empat) bungkus plastik bening di dalamnya diduga ketamine dengan berat jumlah total/bruto 2.888,59 (dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma lima sembilan) gram.

#### Pendampingan dan pengawasan terhadap obat yang digunakan oleh masyarakat di Kota Batam

- BPOM di Batam telah melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan Obat dan Makanan baik secara luring maupun daring dengan melibatkan 1.417 orang masyarakat Kepulauan Riau melalui KIE Obat dan Makanan, serta lebih dari 600 postingan KIE media cetak/elektronik/online/media sosial.
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat antara lain :
  1. Kegiatan Gerakan Keamanan Pangan Desa (2020 - 2023) sebanyak 24 Desa/Kelurahan → Kota Batam sebanyak 6 Kelurahan (Kel. Buliang, Kel. Belian, Kel. Bulang Lintang, Kel. Sei Langkai, Kel. Mangsang, Kel. Sembulang)
  2. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (2020 - 2023) sebanyak 4 pasar → Kota Batam sebanyak 1 Pasar (Pasar Aviari)
  3. Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman (2020-2023) → sebanyak 68 sekolah yang mendapat Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman.
- Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu telah membentuk 6 Desa Pangan Aman di Kabupaten Kepulauan Anambas (Kelurahan Tarempa, Desa Pesisir Timur, Desa Air Bini, Desa Tarempa Barat Daya, Desa Tiangau, Desa Tarempa Barat) dan melatih 108 orang Kader Keamanan Pangan Desa, 300 komunitas. Telah diberikan "Sertifikat Sekolah Dengan PJAS Aman" kepada 16 Sekolah di Kabupaten Kepulauan Anambas; serta telah diintervensi Pasar Inpres-Pasar Sayur-Pasar Baru Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
- Kegiatan sosialisasi / penyuluhan / pemberian informasi terkait obat dan makanan yang diberikan antara lain :
  - - AMR (Antimicrobial Resistance) dan Waspada Obat Ilegal → 28 Januari 2023 dengan peserta sejumlah 366 orang di Kantor BPOM Batam
  - - Cemaran EG / DEG dalam Obat Sirup (Anambas 17 Januari 2023 peserta sebanyak 51 orang Tenaga Kesehatan)
  - - Farmakovigilans

- - Isu terkini tentang Cikibul
- KIE Obat dan Makanan dalam Pameran “Batam Medical Expo” di Grand Batam Mall (8 - 12 Maret 2023)
- KIE tentang Waspada Penyalahgunaan Obat di Tanjung Batu Kab. Karimun (2 Mei 2023) dengan peserta siswa dan guru SMA N 1 Tanjung Batu
- Penyebarluasan Informasi melalui media Iklan Radio “Efek Samping Obat” , “Cek KLIK”, “BPOM Mobile”, “Stunting”, “Kata BPOM” di Radio Batam FM
- Penyebarluasan Informasi melalui media Iklan TV “Urus Izin Edar Jangan Pakai Calo”, “Cek Klik”, “BPOM Mobile” di Batam TV
- Pengawasan terhadap obat yang beredar di wilayah Kepulauan Riau juga telah dilakukan melalui pengujian sampel obat yang disampling dari sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian (IFK, PBF, Rumah Sakit, Puskesmas, Apotek, Klinik) baik sarana JKN maupun Non JKN sebanyak 335 sampel Obat dengan hasil 315 Sampel Obat Memenuhi Ketentuan dan 20 Sampel Obat Tidak Memenuhi Ketentuan (TMS Kadar Zat Aktif, TMS Uji Disolusi dan TMS Uji Mikrobiologi)
- Kerjasama yang dikembangkan dengan Dinas Kesehatan :
  - Keputusan Walikota Batam No. KPTS.292/HK/X/2019 tentang Tim Koordinasi
- Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Batam
  - Jejaring Farmakovigilans terkait penanganan kasus Keracunan Obat, dan KIPI
- (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
  - -enyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan
- Pengawasan Obat dan Makanan dari Badan POM Pusat yang dianggarkan ke 4 Dinas Kesehatan di Prov. Kep. Riau (Kota Batam, Kab. Karimun, Kab. Bintan dan Kota Tanjung Pinang) → Agenda pengawasan rutin terhadap pengelolaan obat di Sarana Pelayanan Kefarmasian serta Pengawasan Sarana dan Produk PIRT
- Untuk penguatan pengawasan obat dan makanan, Balai POM di Batam menjalin kerja sama dalam bentuk Nota kesepahaman (MoU) maupun Perjanjian Kerja Sama Baik dengan Instansi Pemerintah maupun swasta antara lain dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Provinsi Kepulauan Riau, Universitas Mitra Bunda, Politeknik Negeri Batam, Batam Tourism Polytechnic, Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan pada tahun 2023 telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 20 Desember 2023.

## Pengawasan terhadap penggunaan obat herbal (OHT, Fitofarmaka) di Masyarakat Kota Batam

BPOM melakukan pengawasan secara *full spectrum*, mencakup pengawasan sebelum (*pre-market*) dan sesudah (*post-market*) terhadap obat bahan alam. Pengawasan *pre-market* merupakan pengawasan obat bahan alam sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Pengawasan *post-market* merupakan pengawasan obat bahan alam selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk.

Pengawasan pre market dilakukan dengan penerbitan sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap. Sampai saat ini telah diterbitkan 2 sertifikat CPOTB bertahap pada 2 sarana produksi obat bahan alam di Kepulauan Riau (1 Karimun, 1 Batam), namun izin edar belum dapat diterbitkan karena alasan ketidaksiapan sarana dari segi fasilitas dan tenaga kerja. Adapun produk obat bahan alam wajib izin edar yang beredar di wilayah kepri berasal dari luar Batam.

Selama tahun 2023 Balai POM di Batam melakukan pengawasan post market terhadap 21 sarana distribusi obat bahan alam dengan hasil 14 sarana Memenuhi Ketentuan dan 7 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan dengan temuan 94 item Obat Tradisional Tidak Memiliki izin edar dan total nominal temuan Rp 98.429.000.

Terhadap produknya telah dilakukan sampling dan pengujian sampel terhadap 250 komoditi Obat Tradisional yang beredar di wilayah Kepulauan Riau, diantaranya 6 item produk Fitofarmaka dan 5 item Herbal Terstandar dengan hasil sebanyak 224 sampel MS dan 26 sampel TMS.

## Pendampingan terhadap pengembangan industri herbal, obat tradisional dan UMKM di Kota Batam

Balai POM di Batam melaksanakan program pendampingan terhadap UMKM pangan olahan, obat bahan alam/obat tradisional dan kosmetik agar para pelaku usaha dapat menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik dibuktikan dengan terbitnya izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik/ cara produksi pangan obat tradisional yang baik dibuktikan dengan cara produksi obat tradisional yang baik secara bertahap dan atau cara produksi kosmetika yang baik dibuktikan dengan terbitnya sertifikat pemenuhan aspek cara produksi kosmetika yang baik.

Pelaksanaan pendampingan mengacu kepada petunjuk teknis pendampingan UMKM pangan olahan/obat tradisional dan kosmetik Tahun 2023 BPOM melakukan pendampingan terhadap 13 pelaku usaha pangan olahan dan terbit 13 IP CPPOB (Izin Produksi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik), 2 pelaku usaha kosmetik dimana 1 terbit SPA CPKB (Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Produksi Kosmetik yang Baik) dan 1 terbit rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik (importir kosmetik).



Untuk obat tradisional tidak melanjutkan program pendampingan dikarenakan pelaku usaha untuk sementara off produksi. Sepanjang Tahun 2023, Balai POM di Batam telah menerima berbagai penghargaan antara lain:

1. Piagam Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2023 dengan Kategori Pelayanan Prima pada 20 September 2023.
2. Piagam Penghargaan Gubernur Kepulauan Riau sebagai Lembaga yang Berperan dalam Pemberdayaan UMKM pada 26 September 2023.
3. Rekomendasi Sebagai Instansi yang memelihara sistem Manajemen Mutu Iso 9001:2015 Oleh Sucofindo International Certification Services pada 15 November 2023.
4. Penghargaan Penyelenggara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terbaik II Unit Pelaksana Teknis Balai Tahun 2023 pada tanggal 30 November 2023.
5. Piagam Penghargaan Bupati Kepulauan Anambas dalam Program Keamanan Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023.

### **Pemerataan Akses Kesehatan**

Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam telah mencapai cakupan semesta atau *Universal Health Coverage* (UHC) dengan capaian kepesertaan JKN 96 persen. Pasca pandemi, pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM) Kepri juga terus meningkat dan mengalami percepatan, yakni pada 2023 mencapai 79,08, meningkat 0.6 poin (0,76 persen) dibanding tahun 2022.

Komisi IX DPR RI mendorong pemerataan akses kesehatan di Kepulauan Riau (Kepri). Hal ini mengingat, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kepri sudah mencapai 96 persen, namun belum ditunjang dengan pemerataan akses kesehatan. Anggota Komisi IX Edy Wuryanto mengatakan akses kesehatan di Kepri saat ini masih terpusat di Kota Batam saja.

Persoalannya ketika penduduk sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, layanan kesehatannya harus tersedia. Pemerataan layanan kesehatan juga perlu dilakukan dengan menambah sumber daya manusia (SDM) kesehatan di level dokter spesialis. Sebab, selain masih sangat sedikit jumlahnya, dokter spesialis di Kepri juga masih banyak terpusat di rumah sakit di Batam saja.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Komisi IX DPR RI menekankan pentingnya aturan turunan dari UU Kesehatan segera diselesaikan. Sebab dalam aturan turunan tersebut nantinya UU Kesehatan dapat terimplementasi di masyarakat, termasuk salah satu aturannya yang menyangkut pendidikan dokter spesialis.

Amanat Undang-Undang Kesehatan, pendidikan spesialis berbasis hospital harus segera diselesaikan karena hanya dengan cara itu kita dapat mempercepat pendidikan dokter spesialis berbasis hospital untuk memenuhi seluruh layanan kesehatan yang ada di Indonesia.

### **BIDANG KETENAGAKERJAAN**

#### **A. Umum**

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi ini menjadi beranda terdepan NKRI dengan jumlah penduduk 2.150.329 jiwa dengan luas wilayah 425.214,69 Km<sup>2</sup>, yang memiliki 2.409 Pulau. Berdasarkan data nasional indeks kebahagiaan, Provinsi Kepri menduduki peringkat ke 6 dengan nilai 74,78 dan peringkat ke 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan kategori menengah dibidang

ketenagakerjaan secara nasional dan masih memiliki penduduk miskin sejumlah 142,50 ribu jiwa.

2. Data tingkat pengangguran Provinsi Kepri Tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan dari 103.715 menjadi 74.330 meskipun pada saat yang sama terjadi peningkatan pencari kerja dari dalam Provinsi Kepri sendiri maupun dari luar, karena pada yang sama, Kota Batam menjadi daerah tujuan pencari kerja. Peningkatan itu dapat dilihat dari jumlah penduduk bekerja pada tahun 2021 sebesar 1.087.133 jiwa menjadi 1.155.997 jiwa pada tahun 2022. Pada saat yang sama, terjadi penurunan pada angkatan kerja dari tahun 2022 sebesar 1.259.712 jiwa menjadi 1.093.686 jiwa pada tahun 2023.
3. Terkait dengan upah minimum tahun 2024, Provinsi Kepri menetapkan kenaikan sebesar Rp123.298 atau 3,76% yang mencapai Rp3.402.492., sementara Kota Batam sendiri mengalami kenaikan sebesar Rp184.610 atau 4,10% yang mencapai Rp4.685.050,-
4. Peningkatan penyerapan angkatan kerja dan penurunan angka pengangguran ini dicapai, meskipun pada saat yang sama Kota Batam menjadi daerah tujuan pencari kerja, disebabkan pembukaan perusahaan baru yang dilakukan pengusaha (investor) yang pada pandemi Covid melanda, menutup perusahaannya dan saat ini membuka kembali.
5. Terkait dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), penempatan PMI saat ini hanya dilakukan ke Korea Selatan dalam kerangka G to G. Disamping itu, penempatan ke negara Malaysia dan Singapur saat ini juga dilakukan yang sementara ini membuka penempatan pekerja sektor rumah tangga.
6. Terkait permasalahan ketenagakerjaan lainnya antara lain perselisihan hubungan industrial, PHK, Outsourcing, dan sebagainya, Pemerintah Provinsi mendukung penyelesaian dan memberikan fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

#### B. Upah Minimum

Mekanisme penetapan upah minimum Kota Batam tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Dilakukan rapat dewan pengupahan Kota Batam untuk menghasilkan rekomendasi upah kepada walikota Batam yang tertuang didalam berita acara besaran angka Upah Minimum Kota (UMK) Kota Batam tahun 2024 yang ditanda tangani oleh Unsur Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha kepada Walikota Batam dan dilanjutkan dengan rekomendasi UMK Kota Batam tahun 2024 dari Walikota Batam kepada Gubernur Kepulauan Riau agar diterbitkan SK Upah Minimum Kota Batam tahun 2024 oleh Gubernur.

Kewenangan Dewan Pengupahan dalam penentuan upah minimum adalah menentukan nilai alfa 0,10 sd 0,30 dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah yang dibahas pada rapat dewan pengupahan Kota Batam dalam agenda menyampaikan berita acara tentang rekomendasi besaran angka UMK Batam tahun 2024 kepada

Walikota Batam. Penetapan upah minimum Kota Batam telah mengikuti Formula PP 51 Tahun 2021.

Bahwa dengan menggunakan PP 51 Tahun 2023 besarnya relatif lebih besar dan dengan penerapan PP 51 tahun 2023 lebih memungkinkan untuk memprediksi besaran persentase kenaikan upah minimum untuk tahun berjalan. Kondisi ketenagakerjaan di Kota Batam cenderung kondusif dalam pemenuhan hak normatif.

#### Daftar Upah Minimum Provinsi Kepri

NO	PROVINSI/KAB/KOTA	UMP/UMK TAHUN 2023	UMP/UMK TAHUN 2024	KENAIKAN	
				Rp.	%
1	KEPULAUAN RIAU	3,279,194	3,402,492	123,298	3.76
2	KOTA TANJUNGPINANG	3,279,194	3,402,492	123,298	3.76
3	KOTA BATAM	4,500,440	4,685,050	184,610	4.10
4	KAB. BINTAN	3,899,015	3,950,950	51,935	1.33
5	KAB. KARIMUN	3,592,019	3,715,000	122,981	3.42
6	KAB. LINGGA	3,279,194	3,402,492	123,298	3.76
7	KAB. NATUNA	3,337,603	3,406,575	68,972	2.07
8	KAB. KEP ANAMBAS	3,757,560	3,835,605	78,045	2.08

#### C. Hubungan Industrial

Kondisi hubungan industrial di Kota Batam saat ini berjalan sangat kondusif, adpun penanganan apabila terjadi perselisihan selama ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanfaatan bagi para pihak yang berselisih sehingga menghasilkan kesepakatan dengan tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku. Bahwa apabila dilihat dari data perselisihan yang ditangani dengan jumlah perusahaan dan atau pekerja buruh, maka dapat disimpulkan perselisihan yang terjadi masih tergolong rendah.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan, kami optimalkan dengan melakukan sosialisasi dan pemahaman mengenai hubungan industrial kepada pelaku hubungan industrial di wilayah Kota Batam. Jumlah permasalahan hubungan industrial Tahun 2023 ada 139 Kasus dan yang selesai ditangani sebesar 134 kasus (96%).

#### D. Outsourcing

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Batam cenderung kondusif dalam pemenuhan hak normatif. dengan terbitnya PP 35 tahun 2021 permasalahan kontrak kerja sudah membaik dengan terbitnya kompensasi bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). akan tetapi dengan tidak adanya pembatasan pekerjaan apa saja yang dapat di Outsourcing kan kepada pihak ketiga, akan memungkinkan timbulnya konflik karena persaingan harga antar pelaksana outsourcing yang mengakibatkan menurunnya kesejahteraan pekerja. Untuk penyelesaian perselisihan pekerja/buruh outsourcing termasuk

perusahaan BUMN mengikuti prosedur UU Nomor 2 tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

#### E. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan PMI telah diupayakan dan ditingkatkan dan diselenggarakan secara lintas sektoral dengan melibatkan unsur-unsur dari stakeholders terkait, baik sebagai pemateri/narasumber, maupun sebagai peserta dalam kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dalam perlindungan PMI dititikberatkan kepada perwakilan tokoh masyarakat, pemuda, serta bhabinkamtibmas/babinsa yang ada di wilayah-wilayah rentan terjadinya penempatan ilegal PMI atau TPPO. Hal ini bertujuan agar unsur masyarakat dan para Babinsa/Bhabinkamtibmas tersebut dapat menjadi *agent of changes*/agen perubahan yang menularkan informasi kepada seluruh masyarakat di tempat tinggalnya. Sosialisasi perlindungan PMI tidak hanya diinisiasi oleh BP3MI Kepulauan Riau, namun juga diinisiasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, oleh Kementerian seperti Kemnaker dan Kemen PPA, oleh jajaran Kepolisian di daerah, Imigrasi, serta Organisasi Internasional seperti IOM, ataupun UN Women yang memang memiliki *concern* dalam bidang Migrasi Internasional, tidak terkecuali migrasinya para Pekerja Migran Indonesia.

Dalam sosialisasi penempatan PMI secara nonprosedural, di antaranya dilakukan dengan menggandeng Kampus/ Sekolah Tinggi Kesehatan, seperti: Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang, dan Universitas Awal Bros di Batam, khususnya dalam penyebarluasan informasi mengenai peluang kerja skema Government to Government (G to G) Jepang dan Jerman yang banyak menyerap tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi lulusan dari Sekolah Tinggi Kesehatan yang ada di Indonesia. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi penyampaian proses bekerja ke luar negeri secara prosedural kepada masyarakat dalam beberapa event, seperti job fair yang diselenggarakan oleh Kementerian/Dinas Tenaga Kerja, dan dalam kegiatan *car free day* yang mengundang keramaian.

P3MI Kepulauan Riau melakukan langkah verifikasi dokumen penempatan melalui petugas verifikasi yang berkompentensi, dan melakukan pengecekan proses pendaftaran penempatan melalui SISKOP2MI dan atau Sistem Siap Kerja Kemnaker. Apabila terdapat dokumen yang dipalsukan, dan tidak sesuai dengan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2017, maka PMI akan diminta untuk menunjukkan dokumen asli, dan atau legalisir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan dokumen.

Untuk penempatan secara nonprosedural yang praktiknya marak terjadi di Pelabuhan/Embarkasi Pelabuhan Internasional, BP3MI Kepulauan Riau telah melakukan pengawasan dengan membentuk helpdesk di Embarkasi/Debarkasi Pelabuhan Internasional, di antaranya: Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Pelabuhan Internasional Batam Center, Pelabuhan Internasional Harbour Bay Batam, dan Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun. Adapun saat ini tengah dijajaki mengenai pembentukan helpdesk di Bandara Internasional Hang Nadim Batam,

Pelabuhan Internasional Sekupang Batam, dan Pelabuhan Internasional Nongsa Batam.

### Data Penempatan PMI Secara Global



BP3MI Kepulauan Riau telah melakukan inisiasi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan kampus/Sekolah Tinggi Kesehatan, di antaranya : Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang, dan Universitas Awal Bros Batam. Kedua kampus tersebut merupakan salah satu penyuplai tenaga kesehatan/ lulusan tenaga kesehatan di Kepulauan Riau. Perjanjian Kerja Sama tersebut bertujuan untuk melakukan harmonisasi antara kompetensi, kurikulum dan silabus yang akan dikembangkan oleh Pihak Kampus dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri yang sangat banyak membutuhkan tenaga kesehatan terampil. Beberapa negara tujuan utama antara lain Jepang, Korea, Saudi, dan Jerman. Dengan Kerja sama tersebut, diharapkan BP3MI Kepri dan Kampus dapat bersama-sama membuat silabus yang lebih fokus dan terarah, serta dapat memberikan kemudahan serta kisi-kisi mengenai proses pendaftaran, dan penempatan tenaga kesehatan ke luar negeri. Selain itu BP3MI Kepulauan Riau juga melakukan pemetaan potensi kepada SMK-SMK yang mempersiapkan tenaga siap pakai yang dapat diserap pasar kerja luar negeri sesuai dengan background studi pendidikan.

Salah satu kendala utama adalah dalam memunculkan minat dan kemauan lulusan maupun tenaga terampil yang tersedia di Kepulauan Riau untuk bekerja ke luar negeri. Hal ini disebabkan masih adanya kegamangan pada diri lulusan/tenaga terampil tersebut untuk merantau/bekerja di luar negeri. Kendala lainnya adalah belum adanya Balai Latihan Kerja dan Balai Latihan Bahasa spesifik yang dapat menunjang guna mempersiapkan keterampilan calon lulusan/calon tenaga terampil yang ada, sehingga para calon lulusan masih kesulitan dalam meningkatkan skill bahasa asing yang menawarkan banyak peluang kerja ke luar negeri, seperti Bahasa Korea, Jepang, Saudi, dan Jerman.

Peluang dalam penempatan PMI ke luar negeri untuk tenaga terampil adalah bahwa Kepulauan Riau memiliki cukup banyak stok tenaga terampil yang dibutuhkan dalam industri manufaktur maupun kesehatan di luar negeri. Seperti welder untuk industri shipbuilding, spa therapist untuk industri hospitality, serta tenaga kesehatan. Welder, spa therapist maupun tenaga kesehatan terampil tersebut telah memiliki pengalaman kerja dan keterampilan di industri perkapalan, industri perhotelan dan rumah sakit yang cukup banyak ada di Kepulauan Riau. Salah satunya dapat dilihat dari meningkatkan angka penempatan ke Korea Selatan yang membutuhkan welder untuk industri ship building di perusahaan besar seperti Hyundai Heavy Industries dan Samsung Heavy Industries di Korea.

Sementara tantangannya adalah bagaimana tenaga terampil tadi dapat ditingkatkan skillnya dan jumlah ketersediannya dengan meningkatkan/harmonisasi kompetensi dengan standar kebutuhan di luar negeri. Banyak welder baru yang mencoba melakukan pelatihan lewat BLK namun BLK tidak dapat menyediakan kompetensi hingga taraf internasional dikarenakan terbatasnya sumberdaya dan teknologi yang dimiliki BLK, sementara standar kompetensi dan teknologi dimiliki oleh Industri ship yard yang ada di Batam yang notabene tidak bisa dimanfaatkan oleh umum. Kebanyakan tenaga kerja yang diserap ke luar negeri seperti Korea adalah mantan pekerja dari industri ship yard yang ada di Kota Batam. Hal ini juga berlaku bagi sektor hospitality, dimana belum adanya balai pelatihan serta lembaga pelatihan bahasa yang spesifik yang dapat membantu tenaga kerja dalam mempersiapkan skill dan keterampilannya agar dapat diserap oleh pasar kerja luar negeri.

PMI yang meninggal dunia di negara penempatan akan dikoordinasikan dengan perwakilan (KBRI/KJRI) di negara penempatan. BP3MI Kepri akan memfasilitasi pengaduan dan upaya penelusuran kepada ahli waris, dan menyampaikan permintaan ahli waris kepada pihak perwakilan, apakah jenazah diminta akan dipulangkan ke daerah asal, atau dimakamkan di negara penempatan sesuai permintaan keluarga yang diketahui oleh Pemerintah Desa dan RT/RW serta Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.

Selain itu, BP3MI Kepri juga melakukan pemenuhan hak-hak jenazah PMI bilamana ada gaji yang masih belum dibayarkan majikan, serta pemenuhan asuransi bila PMI memiliki asuransi/BPJS Ketenagakerjaan, dan memberikan bantuan biaya pemakaman dan santunan kepada ahli waris. Seluruh proses dilaksanakan berkoordinasi dengan Perwakilan/Kedutaan, Direktorat PWNI BHI Kemlu, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal jenazah PMI.

BP3MI Kepulauan Riau sesuai amanat BP2MI pusat telah membentuk kegiatan pemberdayaan purna PMI yang disebut Perwira PMI (Persatuan Wirausahawan PMI). Pengurus Perwira diharapkan menjadi *agent of changes* yang memberikan perubahan kepada lingkungan melalui peningkatan kegiatan kewirausahaan. Pengurus Perwira diberikan bekal mengenai konsep kewirausahaan, literasi keuangan, serta promosi produk dengan menggandeng BUMN, serta praktisi yang telah berhasil di

bidangnya, untuk memberikan motivasi kepada purna PMI untuk terus meningkatkan dan mengasah skill kewirausahaan.

Selain itu mulai tahun 2024, BP3MI Kepri juga menginisiasi pembentukan Desa Bebas dari TPPO, dengan menggandeng Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa/Kelurahan yang rentan terhadap praktik penempatan ilegal PMI. BP3MI Kepri mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah desa, Bhabinkamtibmas/Babinsa guna menularkan informasi kepada masyarakat, khususnya yang berprofesi sebagai PMI di luar negeri yang masih mengabaikan prosedur penempatan secara prosedural. Dengan program ini diharapkan semakin menekan angka penempatan secara nonprosedural dan meningkatkan angka penempatan secara resmi/prosedural.

No.	Negara Penempatan	Jumlah
1.	Korea Selatan	562
2.	Malaysia	250
3.	Taiwan	1
4.	Arab Saudi	13
5.	Singapura	5
6.	Hongkong	2
7.	Bangladesh	2
8.	Belgia	3
9.	Brunei	1
10.	China	2
11.	Guyana	3
12.	Jepang	2
13.	Meksiko	2
14.	Netherland	2
15.	Philipines	2
16.	Polandia	1
17.	Qatar	1
18.	Slovakia	1
19.	Uea	4
20.	Lainnya	14

Dapat di informasikan bahwa sesuai dengan data Penanganan pemulangan PMI dari negara penempatan yang ditangani oleh Dinas Tenaga kerja kota batam maupun SATGA PPMI Kota Batam terhitung sejak tahun 2017 hingga saat ini belum pernah menangani pemulangan PMI Meninggal Dunia dari luar Negeri. Namun penyelesaian atau penanganan Pemulangan PMI Bermasalah atau Deportasi yang kerap di tangani oleh TIM SATGAS PPMI Kota Batam ialah dengan berkoordinasi dengan KBRI/KJRI di negara tempatan dan TIM SATGAS PPMI Kota Batam melakukan Penjemputan di Pelabuhan yang telah di tunjuk, untuk selanjutnya TIM SATGAS PPMI Kota Batam melalui UPT. BP3MI Prov. Kepulauan Riau memulangkan PMI tersebut ke daerah asalnya.



Berikut daftar negara-negara tujuan penempatan PMI:  
Data Penanganan PMI Bermasalah Tahun 2024

No.	Tanggal Penanganan	Data Pemulangan PMI Melalui Kota Batam	Tanggal Penanganan
		Repatriasi	Deportasi
1.	18 Januari 2024	-	3
2.	4 februari 2024	-	3
3.	5Februari 2024	-	62
4.	19 Februari 2024	-	3
5.	20 Februari 2024	-	71
			<b>142</b>

#### **IV. REKOMENDASI**

Berdasarkan paparan, jawaban tertulis dan diskusi, Komisi IX DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

#### **BIDANG KESEHATAN**

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk segera mengeluarkan seluruh peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga seluruh agenda transformasi kesehatan berjalan lebih optimal.
2. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk memastikan infrastruktur kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan terdistribusi secara merata.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI memastikan seluruh perangkat hukum Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan, termasuk petunjuk teknis, diterbitkan tepat waktu dan di awal tahun sehingga daerah juga dapat merealisasikan anggaran dan program secara tepat waktu dan tepat sasaran.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera mengambil langkah “jemput bola” dalam upaya peningkatan cakupan imunisasi anak rutin termasuk program BIAS, khususnya HPV.
5. Komisi IX DPR RI mendorong rumah sakit milih pemerintah daerah mengembangkan roadmap pengembangan rumah sakit secara vertikal dengan misi adanya pelayanan kesehatan dan pelayanan kedokteran khusus sehingga terpetakan kebutuhan infrastruktur dan SDM bidang kesehatannya.
6. Komisi IX DPR RI meminta DJSN, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan RI terus bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketercapaian *Universal Health Coverage* (UHC) tidak saja dari sisi

kepesertaan tapi yang lebih penting adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

7. Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan langkah-langkah taktis untuk penurunan angka stunting dengan intervensi spesifik dan sensitif. Komisi IX DPR RI juga mendesak BKKBN terus mengupayakan adanya peningkatan percepatan serapan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) bersama Pemerintah Daerah.
8. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI meningkatkan kapasitas dan kapabilitas loka-loka BPOM untuk pengawasan obat dan makanan, khususnya di wilayah perbatasan dan perlintasan antar negara.

### **BIDANG KETENAGAKERJAAN**

1. Pencapaian penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun menjadi 8,6 perlu terus ditingkatkan sehingga pencapaian penurunan angka TPT lebih tinggi lagi.
2. Perluasan kesempatan kerja perlu di sinergikan dengan program Balai Latihan Kerja (BLK) dalam memberikan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan mendukung pertumbuhan industri khusus di Kota Batam dan Provinsi Kepri pada umumnya.
3. Pencapaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kepri, terutama dibidang ketenagakerjaan yang masih berada pada kategori menengah secara nasional dengan nomor urut 9 secara nasional, masih perlu terus ditingkatkan.
4. Penyelesaian permasalahan-permasalahan dibidang ketenagakerjaan yang telah diselesaikan dengan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Kepri, perlu terus didukung dan ditingkatkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan pekerja/buruh di Provinsi Kepri.

### **V. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Batam ini kami sampaikan. Atas perhatianserta kerjasama dari Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

**Jakarta, 13 Maret 2024**  
**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI**  
**KE KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**KETUA TIM**

**Dr. HJ. NIHAYATUL WAFIROH, MA**

**A-35**